

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak dilahirkan manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengikatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Naluri untuk hidup bersama ini dapat diwujudkan dengan dilakukan perkawinan yang di Indonesia diatur dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan amat penting bagi kehidupan manusia, baik perseorangan ataupun kelompok dengan jalinan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan di antara makhluk Tuhan lainnya.

Perkawinan sangat penting karena dapat digunakan sebagai benteng manusia dari perbuatan-perbuatan hina dan nista, yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma agama, susila dan norma hukum terkait dengan masalah atau kebutuhan seks. Perkawinan merupakan bentuk kerja sama antara laki-laki dengan perempuan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Karena setiap manusia sebagai individu bebas dan tidak terikat dengan individu lain sehingga dengan perkawinan sah melahirkan hak dan kewajiban tertentu. Laki-laki dan perempuan yang melakukan perkawinan tersebut merupakan manusia dewasa yang mampu atau cakap hukum. Jadi, apa yang dilakukan

dalam perkawinan tersebut merupakan kesadaran diri termasuk dalam memilih pasangan hidupnya tersebut.

Adanya kondisi khusus terkait dengan perkawinan di dalam kehidupan masyarakat membutuhkan penyelesaian. Seperti seorang yang hidup sebatang kara tanpa sanak kadang, jauh dari sanak saudara dan wali menolak pernikahan. Hal ini tentu diharapkan tidak menghentikan maksud perkawinan dari laki-laki dan perempuan yang bersangkutan. Karena dilandasi oleh rasa cinta dan sayang yang merupakan anugerah dari Tuhan. Karena salah satu syarat sahnya perkawinan adalah adanya wali dari pihak perempuan. Sedangkan rukun dan syarat perkawinan tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.<sup>1</sup> Hal ini menjadi penting untuk dicari solusinya. Tanpa ijin dari wali, pernikahan dianggap tidak sah. Perwalian dapat digantikan oleh wali yang ada sesuai kedekatannya/kekerabatannya dengan mempelai wanita (wali *aqrab*).<sup>2</sup> Namun adakalanya wali menolak menikahkan dengan alasan yang tidak syar'i, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara'.

Perkawinan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Perkawinan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah

---

<sup>1</sup>Amir Syafiruddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, hal 59

<sup>2</sup>Mohd Idris Ramulyo, 2000, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 2

memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa.

Perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 bahwa: "*Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*"

Sesuai dengan rumusan itu, perkawinan tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja tetapi harus kedua-duanya. Dengan adanya ikatan lahir dan batin inilah perkawinan merupakan satu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya, sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan.

Dalam praktek di masyarakat, perihal pelaksanaan perkawinan ditemukan adanya perselisihan mengenai wali, di mana dalam praktek adakalanya perkawinan yang telah disepakati atau disetujui oleh calon suami maupun calon isteri tetapi ternyata ada pihak lain yang keberatan, yaitu wali

nikah atau walinya *adhal* atau enggan atau membangkang. Padahal wali nikah adalah merupakan salah satu rukun nikah, dalam sabdanya Rasulullah Saw mengatakan “Tidak ada nikah tanpa wali” artinya perkawinan tidak sah apabila tidak disetujui oleh wali. Sehingga dibutuhkan penyelesaian yaitu melalui penetapan hakim Pengadilan Agama. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TENTANG PENETAPAN WALI ADHAL MENURUT HUKUM PERKAWINAN (*Studi Kasus Penetapan Nomor 005/Pdt.P/2012/PA.Skh*)”**.

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Setiap kegiatan tentunya dilakukan karena adanya masalah yang ingin diselesaikan. Agar masalah tersebut tidak panjang lebar dibutuhkan adanya pembatasan dan perumusan masalah. Pembatasan masalah dilakukan agar tidak melebar masalah yang dikaji. Sedangkan perumusan masalah dilakukan untuk memperjelas gejala atau fenomena yang akan dikaji.

Mengenai perumusan masalah tidak ada ketentuan yang mengikat, bisa berbentuk pertanyaan ataupun pernyataan. Namun merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan umumnya lebih mudah. Setidaknya ada tiga unsur dalam rumusan masalah<sup>3</sup>, yaitu: (1) harus menyatakan hubungan antara dua gejala (*variable*), (2) harus dinyatakan secara jelas dan tidak mengandung keraguan dan (3) menyiratkan kemungkinan untuk dapat diuji secara empiris.

---

<sup>3</sup>Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 119.

Dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah:

1. Mengapa negara memperbolehkan penetapan wali pengganti ketika wali yang berhak menikahkan menyatakan *adhal*/enggan?
2. Apakah akibat hukum dari penetapan wali *adhal*/enggan?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Agar kegiatan menjadi terarah selain dibutuhkan adanya pembatasan dan perumusan masalah juga dibutuhkan adanya tujuan yang ingin dicapai. Hal ini untuk memberikan arah atau membatasi kegiatan agar tidak menyimpang jauh. Tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dasar hukum dan prosedurnya negara memperbolehkan penetapan wali pengganti ketika wali yang berhak menikahkan menyatakan *adhal*/enggan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari penetapan wali *adhal*/enggan.

Setiap kegiatan tentu dilakukan dengan harapan tertentu yaitu memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

1. Dapat mengembangkan penelitian di bidang hukum perdata mengenai perkawinan khususnya penetapan wali *adhal*.
2. Untuk memberikan bahan kajian tentang penerapan dan prosedur dalam penetapan wali *adhal* sebagai landasan pembangunan hukum di Indonesia.

#### D. Kerangka Pemikiran

Perkawinan sebagai perjanjian hidup bersama antara laki-laki dan wanita secara sah hukum dan agama harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Pernikahan dapat dicegah atau dibatalkan karena rukun dan syarat tersebut tidak memenuhi. Dalam hal ini adalah berkaitan dengan perwalian yang *adhal* (enggan) merestui pernikahan putrinya. Sehingga harus ditempuh melalui prosedur hukum yaitu melalui Penetapan Pengadilan Agama yang menegaskan tentang wali *adhal* tersebut. Sehingga ada akibat hukum berupa pergantian perwalian untuk tetap melangsungkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan tersebut.

#### E. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan Penelitian diartikan sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>4</sup> Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Sistematis berarti urut, metodologis berarti sesuai dengan cara atau metode tertentu yang merupakan pedoman untuk memperoleh pengetahuan lebih dalam tentang gejala atau permasalahan. Sedangkan konsisten berarti tetap pada hal yang sama yaitu sesuai dengan judul, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

---

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal 35

Metode penelitian merupakan metode cara kerja untuk dapat membantu obyek yang menjadi susunan, yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seseorang dimana mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.<sup>5</sup>

Beberapa hal yang terkait dengan metode penelitian adalah sebagai berikut.

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis, dan pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian tentang Tinjauan Hukum Tentang Penetapan Wali *Adhal* Menurut Hukum Perkawinan (*Studi Terhadap Penetapan Nomor 005/Pdt.P/2012/PA.Skh*) termasuk jenis penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data utama.

### **2. Sifat Penelitian**

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejalanya. Maksudnya

---

<sup>5</sup> Sutrisno Hadi, 1997, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: UGM Press, hal 5.

adalah mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam menyusun teori-teori baru.<sup>6</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data atau informasi yang diperoleh dengan cara meneliti kepustakaan. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen dokumen resmi, penelaan literatur-literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Juga ditunjang oleh data primer yaitu hakim dan ahli hukum yang kompeten.

Data sekunder dalam penelitian mencakup:

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat secara yuridis berupa peraturan hukum yang meliputi:

- 1) UUD 1945
- 2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- 4) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 5) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal 10



- 6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- 7) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.
- 8) Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 005/Pdt.P/2012/PA. Skh)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, majalah dan laporan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya: kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif dan sebagainya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dengan metode:

a. Metode penelitian kepustakaan (*library search*)

Dengan metode ini penulis memperoleh data dan informasi dengan cara membaca berbagai buku, majalah, koran, jurnal ilmiah dan literatur lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini.

b. Metode wawancara bebas

Dengan metode ini penulis memperoleh data dan informasi dengan melakukan wawancara bebas tentang penetapan wali *adhal* menurut hukum perkawinan terkait Putusan Nomor 005/Pdt. P/2012/PA.Skh.

## 5. Teknik Analisis Data

Penganalisan data merupakan kegiatan yang penting karena data yang sudah terkumpulkan diolah dan dianalisis guna memecahkan atau menjelaskan masalah-masalah yang telah dikemukakan di muka.

Data yang penulis kumpulkan adalah data kualitatif yaitu keputusan hakim dan keterangan dari hakim maupun ahli hukum. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan. Adapun hasil analisis tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan dan data yang diperoleh.

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah model analisis interaktif, yaitu proses analisis dengan menggunakan tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, sajian data dan kemudian penarikan kesimpulan yang aktifitasnya berbentuk interaktif yaitu sebagai proses siklus. Artinya tahap reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan dilakukan secara sistematis. Bila kesimpulannya belum menjawab permasalahan maka kegiatan diulang kembali dari tahap awal.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam pembahasan skripsi ini penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut.

### **BAB I      PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Skripsi

### **BAB II     TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Perkawinan
- B. Perwalian
- C. Penetapan Pengadilan

### **BAB III    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Dasar Hukum dan Prosedur Penetapan Wali Pengganti terhadap Wali *Adhal*/Enggan
- B. Akibat Hukum dari Penetapan Wali *Adhal*/Enggan

### **BAB IV    PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**